

**Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Pos  
Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Kelas IB Bulukumba**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
pada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**MUHAMMAD RISMAN**

NIM: 10300113005

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Risman  
Nim : 10300113005  
Tempat, Tgl. Lahir : Bulukumba, 16 September 1995  
Jurusan : Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Alamat : Jln. Borong Raya 1 Lorong 1 Nomor 3.  
Judul : Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-  
Cuma Oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri  
Kelas I B Bulukumba.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUD DIN  
MAKASSAR

Samata, Desember 2017

Penyusun

Muhammad Risman

NIM : 10300113005

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul, "*Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba*", yang disusun oleh *Muhammad Risman*, NIM: 10300113005, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 M, bertepatan 16 Rabiul Awal 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 5 Desember 2017 M.  
16 Rabiul Awal 1439 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	:	Prof. Dr. Darussalam, M. Ag	(.....)
Sekretaris	:	Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M. Ag.	(.....)
Munaqisy I	:	Dr. Hamsir, M. Hum.	(.....)
Munaqisy II	:	Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M. Ag.	(.....)
Pembimbing I	:	Dr. Dudung Abdullah, M. Ag	(.....)
Pembimbing II	:	Abdul Rahman Kanang, M. Pd, Ph. D	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M. Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah swt, Tuhan pencipta alam semesta, yang telah memberikan kesempatan dan kebaikan yang tiada tara pada makhluk-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba”. Sesungguhnya Allah senang tiasa mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Demikianlah petunjuk pengetahuan dari Allah SWT yang maha kuasa dan maha mengetahui serta yang maha bijaksana. Serta shalawat dan taslim penulis haturkan kepada baginda Nabiullah Muahammad SAW, sebagai Nabi penutup, Nabi terakhir yang telah memberikan cahaya yang terang bagi umat manusia yang menjadi suri tauladan yang baik bagi umat manusia.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan merupakan milik Allah SWT, pada skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan tetapi peneliti telah berusaha semaksimal untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan dalam penyelesaian skripsi ini tidak hanya terletak pada diri penulis semata, tetapi dalam penyelesaian skripsi ini tentunya banyak pihak yang memberikan sumbangsi. Kedua orang tua yaitu ibunda tercinta Hj. ST. Nasria dan ayahanda H. Salman. Yang selama ini telah memberikan dukungan dan do’a yang tidak pernah putus dan hampir tidak mungkin bisa dibalaskan oleh apapun. Saya anakmu hanya bisa mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya semoga

Allah swt melihat dan membalas dan memberikan sepatutnya apa yang dia ingin berikan. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak memiliki keterbatasan dalam pemikiran dan kemampuan, oleh karena itu dalam kesempatan ini, disampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar selaku pimpinan tertinggi.
2. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan para wakil dekan yang selalu memberikan waktunya untuk memberikan bantuan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dra. Nila Sastrawati M.Si, dan ibu Dr. Kurniati, S.Ag., M.Hi., selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Hukum pidana dan ketatanegaraan telah membantu dan memberikan petunjuk terkait dengan pengurusan akademik sehingga penyusun lancar dalam menyelesaikan semua mata kuliah dan penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Dudung Abdullah, M.Ag., dan bapak Abd. Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D selaku pembimbing yang telah memberikan banyak pelajaran dan petunjuk berharga kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Dosen serta pegawai dalam lingkungan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu pengetahuannya dan membantu penulis dalam menjalani studi.
6. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba, atas izin yang diberikan untuk melakukan penelitian.

7. Sanak keluarga yang telah memberikan dukungan dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulis tidak bisa memberikan apa-apa tetapi penulis hanya bisa memohon kepada Allah SWT memberikan kemurahannya untuk mereka.
8. Kakanda Yogi Prayugo, SH. dan Muh. Irsan S.H, penulis berterimakasih atas bimbingannya selama ini, yang sangat membantu mulai dari awal pembuatan skripsi hingga akhir beserta saran-sarannya untuk kesempurnaan skripsi ini,
9. Marwah SH., Siti Khudzaifah Miftahul Jannah SH., Andi Resky Firadika SH., Muh Qardawi T. S.H, Ilhamsyah S.H, Muh. Nursyam Apriansah S.H, Wahyuni Hamka, Nining Kameliah S.H, Siti Nursari Fadillah S.H, Masnayanti S.H, Fitrianti S.H, sebagai sahabat yang tak henti-hentinya memberikan support kepada penyusun.
10. Teman seperjuangan Hukum Pidana dan ketatanegaraan angkatan 2013 dan terkhusus HPK (A) yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
11. Wahyudiansyah, Tri Ali Akbar, Muh. Iman, Irsan Afendi, dan kawan-kawan seperjuangan di tanah rantauan yang berasal dari mamuju tengah yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
12. Saudara/i seperjuangan Posko 2 (dua) Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Bilanrengi Angkatan ke 55 (lima puluh lima) Kecamatan Parigi, Universitas

Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat kepada penulis;

13. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian ini yang tidak sempat disebut, penulis menghaturkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya.

Gowa, Desember 2017

Penyusun



MUHAMMAD RISMAN

NIM: 10300113005



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	ix
BAB I    PENDAHULUAN .....	1-12
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	8
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
BAB II    TINJAUAN TEORITIS .....	13-31
A. Teori Bantuan Hukum .....	13
1. Teori Kesamaan di Depan Hukum ( <i>Equality Before The Law</i> ) .....	13
2. Teori Efektifitas .....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum .....	15
1. Pengertian Bantuan Hukum .....	15
2. Dasar Hukum Bantuan Hukum .....	19
3. Pengertian Posbakum .....	20
4. Cara Mengakses Layanan Bantuan Hukum Di Posbakum .....	22
5. Dasar Hukum Posbakum .....	23
6. Unsur-Unsur Bantuan Hukum .....	23
7. Asas dan Tujuan Bantuan Hukum .....	24



8. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum .....	26
9. Hak Kaum Miskin dalam Bantuan Hukum .....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>32-36</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Sumber Data .....	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	34
E. Instrumen Penelitian .....	35
F. Metode Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37-70</b>
A. Profil Pengadilan Negeri Bulukumba .....	37
B. Ketentuan Dan Jaminan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin Menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum .....	44
C. Implementasi dan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba .....	48
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Negeri Bulukumba .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71-72</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Implikasi Penelitian.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73-74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

**Nama : Muhammad Risman**  
**Nim : 10300113005**  
**Judul : Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Bulukumba Kelas I B.**

---

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan ; (1) Ketentuan dan jaminan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, (2) implementasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba, dan (3) pandangan Hukum Islam terhadap bantuan hukum secara cuma-cuma oleh pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba.

Jenis penelitian ini menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis dan *syar'i*. sumber data terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Di peroleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan dan data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ketentuan dan jaminan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yakni, bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan bantuan serta informasi terkait tentang suatu permasalahan menyangkut hukum yang sedang dihadapinya baik itu secara litigasi maupun secara nonlitigasi. Sebagaimana hal ini dilaksanakan agar persamaan hak dan keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia di hadapan hukum dapat terwujud agar tidak ada lagi terjadi diskriminasi terhadap kaum miskin dalam mengakses keadilan (2) implementasi pemberian bantuan hukum oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba, telah dibuka sejak tahun 2016 hingga saat ini dan telah menangani beberapa kasus perkara baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi, dimana pada tahun 2016 sebanyak 60 perkara yang terbagi atas jalur Litigasi (Pidana 54 dan perdata 2) dan jalur Nonlitigasi sebanyak 4 kali penyuluhan, dan pada tahun 2017 sebanyak 17 perkara yang terbagi atas jalur Litigasi (Pidana 13 dan Perdata 2) dan jalur non litigasi sebanyak 2 kali penyuluhan. (3) persamaan hak di muka hukum yang merupakan salah satu ajaran pokok dalam hukum Islam. Baik yang menyangkut soal ibadah dalam arti yang terbatas, yakni hubungan antara makhluk dan khaliknya maupun dalam arti yang luas, yakni hubungan *mu'amalat* antar manusia., Hukum Islam mengakui dan menegakkan prinsip adanya persamaan hak di muka hukum untuk semua umat manusia. pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba, sebagai wujud persamaan hak di hadapan hukum kepada para pencari keadilan, telah sesuai dengan menyatakan bahwa perlakuan dan pemberian hak yang sama kepada sesama manusia, sebagai mana dalam Islam diwajibkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Diperlukan kerjasama yang lebih efektif lagi kedepannya antara pihak Posbakum dengan pihak Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. 2) Diperlukan peran serta semua pihak yang berada di Wilayah Hukum Kabupaten Bulukumba agar asas persamaan hak bagi seluruh masyarakat dapat meningkat. 3) Diperlukan adanya penambahan anggaran dari Mahkamah Agung dalam hal pemberian layanan bantuan hukum, dikarenakan pembebasan biaya perkara bagi para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba masih belum mencukupi.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Sejak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di berlakukan pertama kali pada tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah memiliki kesadaran akan konsep Negara Hukum sebagai pilihan yang ideal bagi Negara Indonesia yang diproklamasikan satu hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945.<sup>1</sup> Para pendiri (*founding fathers*) Republik Indonesia ini telah bertekad untuk membentuk Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan Negara Kekuasaan (*machtsstaat*). Dalam Negara Hukum, individu dan Negara berdiri sejajar.<sup>2</sup> Hal ini terbukti dari penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Indonesia ialah negara yang berdasar atas Hukum (*rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”.<sup>3</sup>

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Negara Hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak lain.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi* (Cet. I; Jakarta Pusat :YLBHI, 2013), h. 1.

<sup>2</sup>Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum* (Cet. I; Jakarta; PT. Elex Media Komputindo, 2000), h. 45.

<sup>3</sup>Republik Indonesia, *Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar 1945*.

<sup>4</sup>Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 19-20.

Dalam buku *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Moh. Yamin mendefinisikan Negara Hukum (*rechtsstaat*) atau *government of laws* sebagai berikut:

“kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah hanya berdasarkan dan berasal dari undang-undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuatan senjata, kekuasaan kesewenang-wenangan, atau kepercayaan bahwa kekuatan badanlah yang boleh memutuskan segala pertikaian dalam negara.”<sup>5</sup>

Dimana bentuk interaksi baik warga negaranya maupun pelaksanaan pemerintah di dalam negara tersebut diatur wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep negara hukum dapat diasalkan pada gagasan-gagasan pencerahan mengenai kedaulatan manusia dalam menentukan jalan kehidupan sosialnya. Manusia dalam pengertian kebertahapan, bergerak dari individu menuju relasi sosial sehingga hukum dalam makna yang lebih tegas adalah sistem yang dihasilkan dari sebuah kesepakatan-kesepakatan ataupun konsensus-konsensus yang lazim disebut kontrak sosial (*Social Contract*). Dalam pengertian ini, kekuasaan bersumber dari hukum yakni kesepakatan sosial. Dengan demikian kedaulatan dalam negara ada pada hukum yang seluruh entitas politik, sosial, dan ekonomi dibawahnya tunduk pada hukum tersebut.<sup>6</sup>

Dalam perkembangan peradaban hingga saat ini, hampir seluruh negara telah menerapkan konsepsi Negara Hukum dengan segala varian asas dan bentuknya, walaupun masih terdapat negara-negara tertentu yang bertahan dengan sistem kedaulatan berdasar kekuasaan (penguasa). Dalam mengartikan hukum sebagai asas kedaulatan, terdapat dua tradisi (aliran) dalam konsepsi negara hukum yaitu, konsep

---

<sup>5</sup>Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum* (Bandung: Alumni, 1983), h. 22,

<sup>6</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), h. VII.

Negara Hukum *rechtsstaat* dan konsep Negara Hukum *the rule of law*. Dalam konsepsi negara hukum *rechtsstaat*, penegakan hukum dimengerti sebagai penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang sesuai dengan paham *legisme* yakni bahwa hukum identik dengan undang-undang sehingga ada ‘kepastian hukum’. Sementara konsep negara hukum *the rule of law*, dimengerti bahwa penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis belaka, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang tertulis.<sup>7</sup>

Terlepas dari pemahaman negara hukum di atas dalam sebuah peribahasa pepatah latin menyatakan “*leges jeraque servat*” artinya hukum dan aturan mesti ditegakkan, serta diwujudkan sehingga kehidupan umat manusia akan mengalami keadilan, damai dan sejahtera. Hukum tidak boleh terbelenggu menjadi sekedar jargon, tetapi harus menjadi napas, roh, bahkan menjadi panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsadan bernegara.<sup>8</sup>

Untuk mencapai makna keadilan dan persamaan hak bagi seluruh warga negara dihadapan hukum, dalam pasal 27 ayat 1 UUD tahun 1945 menegaskan terkait posisi warga negara yakni “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>9</sup>

Dijelaskan pula dalam pasal 28 D ayat (1), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>10</sup>

<sup>7</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, h. IX.

<sup>8</sup>Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat* (Cet. I; Bandung:Yrama Widya), h. v.

<sup>9</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 27 Ayat 1

<sup>10</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 28 D Ayat 1

Persamaan di hadapan hukum bagi setiap warga negara di Indonesia merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dalam mewujudkan keadilan di satu pihak dan di lain pihak sebagai sistem norma hukum.<sup>11</sup>

Sebagaimana berdasarkan pengertian dan ruang lingkup hak asasi manusia diketahui dan dipahami bahwa di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum, amat dihormati dan dijunjung tinggi hak asasi manusia sehingga dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 diungkapkan: (1) meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam aspek kehidupan, dan (2) menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum di tangani secara tuntas.<sup>12</sup>

Penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk penghormatan terhadap hak tersangka, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian sistem hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia telah lama memperjuangkan dan mencita-citakan suatu Hukum Acara Pidana Nasional yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka. Untuk itu, diperlukan suatu proses hukum yang adil (*due process of law*) melalui suatu Hukum Acara Pidana Nasional yang lebih memperhatikan hak-hak tersangka.<sup>13</sup>

Pada Sila Kedua dari Pancasila pun ditegaskan bahwa manusia diakui serta diberlakukan sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, persamaan hak dan kewajiban tanpa membedakan Suku, Keturunan, Agama Dan Kepercayaan, Jenis Kelamin, Kedudukan Sosial, Warna Kulit dan sebagainya.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 101.

<sup>12</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, h. 92.

<sup>13</sup>Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum*, h. 63-64.

<sup>14</sup>R. Soeroro, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet, 10; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 249.

Pasal 34 ayat 2 UUD tahun 1945 “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.<sup>15</sup>

Dalam kehidupan sosial, tidak jarang persoalan sederhana membawa seseorang dalam perkara hukum, salah satu upaya agar terhindar dari persoalan hukum yang lebih rumit adalah dengan menggunakan jasa Advokat.<sup>16</sup> Terlebih lagi ketika orang tersebut sedang dalam kondisi dililit masalah ekonomi, maka sangat memungkinkan seseorang melakukan tindak kejahatan.

Oleh karena itu, bantuan hukum adalah tanggung jawab negara atau pemerintahan bersama-sama Masyarakat, Organisasi Advokat, Pengusaha dan Industriawan, serta semua pihak yang peduli terhadap keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan.<sup>17</sup>

Persamaan hak di muka hukum adalah salah satu ajaran pokok Hukum Islam, baik yang menyakut soal ibadah dalam arti yang terbatas, yakni hubungan antara makhluk dan khaliknya maupun arti luas, yakni hubungan *mu’amalat* antar manusia, Hukum Islam mengakui dan menegakkan prinsip adanya persamaan hak di muka hukum untuk semua umat manusia.

Perbedaan tingkat dan kedudukan sosial serta perbedaan nasib dalam rezeki, sekali-kali tidak dapat dan tidak boleh menjadi alasan untuk memperbedakan hak seseorang di muka hukum, baik hukum manusia maupun hukum Tuhan.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 34 Ayat 2.

<sup>16</sup>Lukman Santoso Az, *Buku Pintar Beracara* (Cet, I; Jogjakarta: Flashbooks, 2014), h. 77.

<sup>17</sup>Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum*, h. 108.

<sup>18</sup>Anwar Harjono, *Hukum Islam keluasan dan Keadilannya* (Cet, II; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987) h. 214.

Dalam Islam, kesetaraan hak dan kewajiban antara sesama manusia didasarkan pada konsep secara normatif pada prinsip persamaan (*Al-musawat*) dan kebebasan (*Al-hurriyat*) dalam norma-norma *syariah* bahwa asas paling fundamental tentang harkat dan martabat kemanusiaan lebih didasarkan pada pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap manusia tanpa diskriminasi ras, suku, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan dan agama, sikap politik, status sosial, dan lain-lain. Persamaan hak ini menjadi dasar bagi perumusan konsep bantuan hukum dalam Hukum Islam.

Jika dikaji lebih lanjut, bantuan hukum merupakan sarana dalam pelaksanaan keadilan yang sangat penting untuk mencapai persamaan hak di hadapan hukum, dikarenakan bagaimana mungkin pelaku tindak kejahatan menyewa jasa Advokat sedangkan kebutuhan sehari-hari mereka saja belum terpenuhi dengan baik. Sehingga Problem dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasan akses yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum, meskipun doktrinya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga tanpa terkecuali (*justice for all/accessible to all*) sehingga untuk mengefisienkan pelaksanaan persamaan di hadapan hukum, maka lahirlah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, untuk menciptakan keadilan bagi para tersangka atau terpidana yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah.

Bentuk bantuan hukum pada dasarnya sama, tetapi tentunya ada variasi di berbagai negara dalam model pembelaan umum bagi orang miskin (*pro bono publico* atau *prodeo*) dan hak untuk didampingi advokat atau penasihat hukum (*access to legal counsel*).<sup>19</sup> Sebagaimana hal ini telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor

---

<sup>19</sup>Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum*, h.80.



1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.<sup>20</sup> dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma.<sup>21</sup>

Adapun lembaga yang bertugas dan menjalankan bantuan dan pelayanan bantuan hukum bagi para pencari keadilan yakni pos bantuan hukum (Posbakum) yang berkantor di setiap lembaga badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung.

Dari uraian latar belakang diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa betapa pentingnya bantuan hukum bagi tersangka yang termasuk ke dalam golongan orang tidak mampu (miskin) dan saat ini bantuan hukum merupakan suatu hal yang sangat diwajibkan untuk dilaksanakan dan bukan lagi suatu belas kasihan semata. Logikanya adalah jika kepada masyarakat dapat diberikan pendidikan gratis atau layanan kesehatan gratis, kenapa tidak terhadap pemberian layanan hukum gratis atau tanpa biaya baik itu bantuan hukum dengan jalur litigasi maupun nonlitigasi ?<sup>22</sup> Sehingga dari permasalahan ini menarik untuk dikaji dan diteliti oleh penulis dengan memaparkan skripsi ini dengan judul: “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba”.

---

<sup>20</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.*

<sup>21</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. No. 83 Tahun 2008.*

<sup>22</sup>Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*( Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group,2015), h.51.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok masalah adalah bagaimana Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Posbakum Di Pengadilan Negeri Bulukumba Kelas IB ?. Adapun submasalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan dan jaminan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ?
2. Bagaimana implementasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin oleh posbakum di Pengadilan Negeri Bulukumba?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terkait ketentuan dan pemberian layanan bantuan hukum bagi tersangka pidana secara cuma-cuma oleh posbakum di Pengadilan Negeri Bulukumba ?

## **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Agar permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari rumusan permasalahan yang ditentukan, maka penelitian ini perlu dibatasi permasalahannya sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut :

### **1. Fokus penelitian.**

- a. Implementasi
- b. Bantuan Hukum secara Cuma-cuma
- c. Posbakum

## 2. Deskripsi fokus.

- a. Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan tentang sesuatu yang sudah disepakati atau direncanakan.
- b. Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau tanpa biaya.
- c. Posbakum adalah singkatan dari pos bantuan hukum yang dimana merupakan Pusat Layanan Bantuan Hukum yang didirikan dan berkantor di pengadilan negeri dengan tujuan untuk memberikan layanan berupa pemberian nasihat hukum, konseling, dan pembuatan gugatan bagi mereka yang tidak mengetahui masalah hukum dan tidak mampu membayar pengacara untuk menyelesaikan masalah hukum.

Fokus penelitian	Deskripsi fokus
1. Implementasi	Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan tentang sesuatu yang sudah disepakati atau direncanakan.
2. Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma	Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau tanpa biaya.
3. Posbakum	Posbakum adalah singkatan dari pos bantuan hukum yang dimana merupakan Pusat layanan bantuan hukum yang didirikan dan berkantor di pengadilan negeri dengan tujuan untuk memberikan layanan berupa pemberian nasihat hukum, konseling, dan pembuatan gugatan bagi mereka yang tidak mengetahui masalah hukum dan tidak mampu membayar pengacara untuk menyelesaikan masalah hukum.

#### **D. Kajian Pustaka**

Skripsi ini berjudul “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Posbakum Di Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba”. Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan beberapa buku, penelusuran internet, dan peraturan-peraturan tersebut, yaitu:

Frans Hendra Winarta dalam bukunya “Bantuan Hukum”. Mengatakan bahwa bantuan hukum adalah merupakan suatu hak asasi manusia yang wajib dilaksanakan dan bantuan hukum bukan lagi suatu hal yang berupa belas kasihan semata. Dalam buku tersebut menjelaskan hak untuk mendapatkan bantuan hukum namun tidak menjelaskan secara rinci mengenai bantuan hukum secara Cuma-cuma.<sup>23</sup>

Fajlurrahman Jurdi dalam bukunya “Teori Negara Hukum”. Dalam buku ini pembahasannya menjelaskan berbagai jenis dan teori bentuk negara hukum, serta tugas dan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. Akan tetapi dalam buku ini tidak membahas secara rinci tentang bagaimana hak masyarakat untuk mengakses keadilan secara cuma-cuma dalam hal ini bantuan hukum secara Cuma-cuma.<sup>24</sup>

Munir fuady dan Sylvia laura L. fuady yang berjudul “Hak Asasi Tersangka Pidana”. Dalam buku ini pembahasannya terkait hak asasi tersangka dalam proses peradilan dan ketidak berdayaan tersangka, terdakwa, atau terpidana meskipun kepadanya oleh undang-undang telah dianugerahkan hak-hak yang telah diakui secara Universal yang dalam hal ini ditinjau dari Perspektif Hukum Indonesia.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Frans Hendra Winarta. *Bantuan Hukum* (Cet. I; Jakarta:PT. Elex Media Komputindo, 2000).

<sup>24</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum* (Cet I:Malang:Setara Press,2016).

<sup>25</sup>Munir Fuady Dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

Weinata Sairin dalam bukunya “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat”. Dalam buku ini memuat kumpulan perundang-undangan tentang advokat dan juga memuat kumpulan perundang-undangan tentang bantuan hukum.<sup>26</sup>

Andi sofian dan Abd. Asis dalam bukunya “Hukum Acara Pidana”. Dalam buku ini membahas bagaimana hukum acara pidana dalam pelaksanaan perolehan pembelaan dari seorang Advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang (*justice for all*).<sup>27</sup>

Dari beberapa penjelasan penelitian di atas baik secara perorangan maupun kelompok belum ada yang membahas tentang Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Posbakum Di Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba. meskipun dari empat sumber tersebut telah ada yang tentang bantuan hukum. Tetapi belum ada yang menjawab secara rinci masalah yang akan diteliti. Oleh sebab itu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut dan pengetahuan secara mendalam tentang penelitian tersebut.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian memiliki tujuan dan kegunaan, adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian.
  - a) Untuk mengetahui ketentuan dan jaminan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

---

<sup>26</sup>Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat* (Cet. I; Bandung:Yrama Widya).

<sup>27</sup>Andi Sofyan Dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana* (Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

- b) Untuk mengetahui implementasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Posbakum Di Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba.
- c) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap implementasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Posbakum Di Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba.

## 2. Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Dapat memberikan manfaat mahasiswa dalam menyelesaikan tugasnya. Serta penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum acara pidana terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka yang memiliki tergolong ekonomi rendah (miskin)
- b) Kepada lembaga hukum yang terkait agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efisien sehingga permasalahan bantuan hukum dapat terlaksana dengan baik dan efisien agar persamaan dihadapan hukum dapat terealisasi.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Teori Bantuan Hukum

##### 1. Teori Kesamaan di Depan Hukum (*Equality Before The Law*)

Dalam konteks keadilan kesamaan hak masyarakat di depan hukum yang memiliki arti bawa pelaku kejahatan dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat maupun Hak Asasi Manusia (HAM) ringan khususnya tindakan diskriminatif seharusnya dapat diadili dalam suatu wadah pengadilan HAM, karna sama-sama merupakan suatu perbuatan pelanggaran HAM yang sesuai yang dijelaskan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*) dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 D ayat (1) setiap orang yang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kemudian dipertegas kembali dalam undang-undang yang di terapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda. Pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.

##### 2. Teori Efektifitas

Efektivitas adalah gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya ketertarikan antara nilai-nilai yang bervariasi.<sup>1</sup> Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran

---

<sup>1</sup>Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, h. 129.

sejauh mana target dapat tercapai.<sup>2</sup> Efektivitas yang dimaksud dalam pembahasan ini yakni efektifitas hukum. Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.<sup>3</sup> Selain itu, efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>4</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), yaitu berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berada dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja* (Cet. III; Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), h. 59.

<sup>3</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 62.

<sup>4</sup>Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Cet. VII; Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011), h. 53.

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 9.



## **B. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum**

### **1. Pengertian Bantuan Hukum**

Dalam perkembangannya terdapat banyak pengertian atau definisi dari bantuan hukum itu sendiri, berikut beberapa definisi tentang bantuan hukum antara lain :

#### **a. UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum**

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang di berikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.<sup>6</sup> Bantuan Hukum dalam kamus hukum adalah bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau penasehat hukum kepada seorang terdakwa di pengadilan.<sup>7</sup>

#### **b. UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat**

Bantuan hukum menurut pasal 1, angka 9 undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat, bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu”.<sup>8</sup> Jadi pengertian bantuan hukum menurut pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 di atas, bahwa bantuan hukum oleh seseorang advokat yang diberikan kepada seseorang (klien) secara cuma-cuma dalam hal penunjukan hakim karena klien yang tidak mampu.<sup>9</sup>

#### **c. PP No. 83 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.<sup>10</sup>**

Bantuan Hukum Secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi

---

<sup>6</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 Ayat (1)*.

<sup>7</sup>M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition. (Cet I; Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 91.*

<sup>8</sup>Republik Indonesia, *Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 1 Ayat (9)*.

<sup>9</sup>Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, h. 115.

<sup>10</sup>Republik Indonesia, *peraturan pemerintah nomorundang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.*

hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu..

Sedangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan lain, bantuan hukum tidak disebutkan secara langsung terkait dengan definisi bantuan hukum itu sendiri, tetapi di dalamnya menyebut bentuk bantuan hukum atau fungsi bantuan hukum, beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

a. UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana

Tidak terdapat definisi khusus mengenai bantuan hukum dalam undang-undang ini, yang ada adalah pengaturan mengenai kewajiban negara untuk menyediakan penasihat hukum bagi orang yang tidak mampu. Dalam pasal 56 ayat (1) menyatakan “dalam hal terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.<sup>11</sup>

b. UU No. 11 tahun 2009 mengenai kesejahteraan sosial.

Dalam Pasal 14 UU Kesejahteraan Sosial, bantuan hukum di kategorikan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial, yang mana dalam pasal tersebut “perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan ketentraman sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal”.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 56 Ayat (1)*.

<sup>12</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 14*.

c. UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Tidak ada definisi khusus mengenai bantuan hukum dalam undang-undang ini, hanya dalam pasal 37-39 terdapat ketentuan bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum dan sejak perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat.<sup>13</sup>

d. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum

Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan peradilan umum adalah meliputi Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa Advokat, pembebasan biaya perkara baik pidana maupun perdata, dan biaya sidang di tempat sidang tetap (*Zitting Plaatz*).<sup>14</sup>

Dalam pengertian bantuan hukum terdapat beberapa bentuk pelayanan bantuan hukum diantaranya, *Legal Aid*, *Legal Assistance*, dan *Legal Service*. Ketiganya memiliki pengertian dan bentuk pelaksanaan yang berbeda, adapun penjelasannya antara lain:

a. *Legal Aid*.

*Legal aid* merupakan bentuk bantuan hukum kepada seseorang yang dilakukan secara Cuma-Cuma dan di khususkan kepada masyarakat yang tidak mampu. *Legal aid* secara konseptual merupakan bentuk upaya penegakan hukum dengan melakukan pembelaan terhadap kepentingan dan hak-hak masyarakat miskin.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 37-39).

<sup>14</sup>Republik Indonesia, *surat edaran mahkamah agung nomor 10 tahun 2011 tentang pedoman bantuan hukum*.

<sup>15</sup>Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Cendana Press, 1983), h. 34, Dikutip Dalam Lukman Santoso Az, *Buku Pintar Beracara* (Cet, I; Jogjakarta: Flashbooks, 2014), h. 66.

*b. Legal Assistance*

*Legal assistance* merupakan pemberian bantuan hukum kepada seluruh kelompok masyarakat. *Legal assistance* memiliki makna yang lebih luas daripada Legal Aid. Konsepsi *Legal Assistance* adalah memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin dan memberikan bantuan hukum dengan imbalan jasa kepada masyarakat yang tidak mampu.<sup>16</sup>

*c. Legal Service*

*Legal service* adalah pelayanan hukum. *Legal Service* hadir untuk memberikan pelayanan atau bantuan hukum kepada seluruh orang dengan tujuan menjamin hak seluruh orang untuk mendapatkan nasihat hukum. Hal ini dilakukan agar pelayanan hukum dalam praktiknya tidak diskriminatif karena adanya perbedaan status kekayaan seseorang. Dalam konsep *Legal Service* terdapat beberapa makna dan tujuan.

*Pertama*, pelayanan diberikan kepada masyarakat dengan tujuan menghapuskan diskriminasi dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan hukum kepada masyarakat.

*Kedua*, pelayanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kebenaran hukum dengan jalan menghormati hak yang diberikan oleh hukum kepada setiap anggota masyarakat.

*Ketiga*, selain upaya penegakan hukum dan penghormatan hak hukum kepada setiap orang, legal service juga lebih mendahulukan penyelesaian sengketa dengan cara berdamai.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Lukman Santoso Az, *Buku Pintar Beracara*, h. 66.

<sup>17</sup>Lukman Santoso Az, *Buku Pintar Beracara* (Cet, I; Jogjakarta: Flashbooks, 2014), h. 66-67.

## **2. Dasar Hukum Bantuan Hukum**

### **1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum**

Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum di bentuk dan menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Lahirnya undang-undang ini didasarkan karena sebelumnya pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum menyentuh prang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidak mampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian bantuan bantuan hukum dalam undang-undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

### **2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ini lahir berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Dimana peraturan pemerintah ini menegaskan, pemberian banyuan hukum diselenggarakan oleh menteri hukum dan ham dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat. Pemberian bantuan hukum dalam PP ini meliputi masalah keperdataan, masalah hukum pidana, masalah hukum tata usaha

negara, baik secara litigasi maupun non litigasi, hal tersebut sesuai dengan pasal 5 ayat (1) peraturan pemerintah ini.

2. UU No, 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
3. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
5. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-03.Hn.03.03 tahun 2013 Tentang Besaran Biaya.
6. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-02.Hn.03.03 Tahun 2013 Tanggal 31 Mei 2013 Tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum.
7. Petunjuk Pelaksanaan Tentang Pengawasan Bantuan Hukum

### **3. Pengertian Posbakum**

Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha Negara.<sup>18</sup>

Secara eksplisit memang tidak disebutkan bantuan hukum yang diberikan mulai dari penyelidikan sampai pada proses pengadilan. Tetapi, melihat dari pihak-pihak yang memerlukan layanan posbakum adalah penggugat/pemohon, tergugat/termohon, terdakwa, atau saksi, posbakum dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan negeri tingkat pertama dan bantuan hukum yang diberikan pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada setiap pengadilan dibentuk posbakum pengadilan.<sup>19</sup> pembentukan posbakum pengadilan dilakukan secara bertahap.<sup>20</sup> Pengadilan menyediakan dan mengelola ruang dan sarana/prasarana untuk posbakum pengadilan sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.<sup>21</sup>

- a. Posbakum pengadilan memberikan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.<sup>22</sup>
- b. bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- c. penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

---

<sup>18</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*, Pasal 1 Angka 5.

<sup>19</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*, Pasal 23 Ayat 1.

<sup>20</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*, Pasal 23 Ayat 2.

<sup>21</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*, Pasal 23 Ayat 4.

<sup>22</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*, Pasal 23 Ayat 5.

Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma.

#### **4. Cara Mengakses Layanan Bantuan Hukum Di Posbakum**<sup>23</sup>

Setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada posbakum pengadilan.

Orang atau kelompok orang yang dimaksud adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai:<sup>24</sup>

1. Penggugat/pemohon, atau
2. Tergugat/termohon atau
3. Terdakwa atau
4. Saksi

Dan prosedur yang dikatakan tidak mampu secara ekonomi dibuktikan dengan melampirkan:<sup>25</sup>

- a) Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/kepala wilayah setingkat yang menyatakan yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b) Surat keterangan tunjangan social lainnya seperti kartu keluarga miskin (KKM), kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), kartu beras

---

<sup>23</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*, Pasal 23 Ayat 6.

<sup>24</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*, Pasal 23 Ayat 7.

<sup>25</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*, Pasal 25.



miskin (Raskin), kartu program keluarga harapan (PKH), kartu bantuan langsung tunai (BLT), kartu perlindungan sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau

- c) Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan di tanda tangani oleh pemohon layanan posbakum pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

## **5. Dasar Hukum Posbakum**

- a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman .
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
- d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

## **6. Unsur-Unsur Bantuan Hukum**

Bantuan hukum adalah jasa memberi bantuan dengan bertindak sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan (*litigation*) dan atau memberi nasehat di luar pengadilan (*non litigation*).

Unsur-unsur dari bantuan hukum adalah sebagai berikut:

- a) Adanya jasa hukum.
- b) Tindakan untuk menjadi pembela/kuasa di luar maupun di dalam pengadilan.
- c) Adanya nasehat-nasehat hukum/konsultan hukum.

## **7. Asas dan Tujuan Bantuan Hukum**

### **1. Asas bantuan hukum**

Berdasarkan pasal 2 UU No. 16 Tahun 2011, bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

#### **a. Asas Keadilan.**

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

#### **b. Asas persamaan kedudukan di dalam hukum.**

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

#### **c. Asas keterbukaan efisiensi**

Yang di maksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

#### **d. Asas efisiensi**

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran.<sup>26</sup>

#### **e. Asas efektivitas**

---

<sup>26</sup>Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat*, h. 61.

Yang dimaksud dengan “asas efektifitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

f. Asas Akuntabilitas

Yang dimaksud “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.<sup>27</sup>

2. Tujuan bantuan hukum

Berdasarkan keputusan menteri kahakiman R.I. No. 02.UM.09.08 Tahun 1980 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum, dalam konsiderannya, bahwa “tujuan pemberian bantuan hukum khusus bagi mereka yang tidak atau kurang mampu, sehingga di dalam pasal 22 ayat (1) undang-undang No. 8 tahun 2003 tentang Advokat, ditegaskan bahwa “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.

Jadi sasaran bantuan hukum ini, adalah mereka/anggota masyarakat yang tidak atau kurang mampu. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum ini diselenggarakan melalui badan peradilan umum (pasal 1 ayat (1) keputusan menkeh RI No. N.02.UM.09.08 Tahun 1980).

Bantuan hukum menurut pasal 1 ayat (2) keputusan Menkeh RI No. N.02.UM.09.08 Tahun 1980, bahwa yang tidak/kurang mampu dalam perkara pidana yang diancam dengan pidana :

1. Lima tahun penjara atau lebih, seumur hidup atau pidana mati.
2. Kurang dari lima tahun, tetapi perkara tersebut menarik perhatian masyarakat luas.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat*, h. 62.

Selain dari pada tujuan di atas terdapat juga tujuan pemberian bantuan hukum dengan melihat dari beberapa aspek, antara lain:

a. Aspek kemanusiaan.

Dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat golongan tidak mampu di depan pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

b. Aspek peningkatan kesadaran hukum.

Dalam aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.

## **8. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum**

Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum yang diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum antara lain:

a. Pasal 14

1. Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat:

---

<sup>28</sup>Andi Sofyan Dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana* (Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h.116.

- a). Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
  - b). Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan
  - c). Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.
2. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan

b. Pasal 15

- 1. Permohonan bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum.
- 2. Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus di berikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum.
- 3. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
- 4. Dalam hal permohonan bantuan hukm ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan.
- 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan peraturan pemerintah

Adapun peraturan pemerintah yang dimaksud yakni (peraturan pemerintah nomor 83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma).

## 9. Hak Kaum Miskin dalam Bantuan Hukum

### 1. Bantuan hukum sebagai hak konstitusional

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan dan mewujudkan suatu negara hukum dalam praktik beracara dalam perkara pidana, yaitu dengan ditetapkannya undang-undang No. 8/1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yang mengutamakan prinsip “*due process of law*” dengan memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap tersangka dan terdakwa.<sup>29</sup>

Hak dari tersangka pidan untuk mendapatkan pembelaan hukum merupakan suatu hak fundamental yang dijamin oleh hukum dan negara kepada tersangka dari suatu tindak pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum dari seorang pembela yang terakreditasi, berlaku terhadap seluruh proses hukum pidana, sehingga tersangka pidana tersebut dan dapat menjalankan proses hukumnya secara yang tidak merugikan dirinya sehingga tercapai suatu ketentuan hukum yang berkeadilan baik bagi dirinya sendiri, bagi korban kejahatan, maupun bagi seluruh masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal-hal tertentu, bahkan pemerintah maupun profesi advokat harus menyediakan dan/atau menawarkan bantuan hukum cuma-cuma terhadap tersangka pidana tertentu.<sup>30</sup>

Tidak banyak orang yang tahu bahwa bantuan hukum adalah bagian dari profesi advokat. Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosio-ekonomi, kaya/miskin, keyakinan politik, gender dan ideologi. Delapan dari sepuluh orang Indonesia kalau ditanya tentang bantuan

<sup>29</sup>Andi Sofyan Dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana* (Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h.120.

<sup>30</sup>Munir Fuady Dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h.27.

hukum tidak dapat membedakannya dengan provisi advokat. Namun, keharusan membela orang miskin dalam profesi advokat sejalan dengan prinsip *justice for all* membuat profesi hukum yang satu ini populer di masyarakat internasional, tetapi tidak demikian halnya di Indonesia.<sup>31</sup>

Jaminan perlindungan atas hak konstitusional untuk dibela oleh advokat adalah penting dalam praktik peradilan dan ini berlaku untuk orang yang mampu dan juga untuk fakir miskin.

Berdasarkan pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik dari fakir miskin. Atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang yang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*). Penegasan sebagaimana diambil dari pasal 34 ayat (1) UUD 1945 memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional<sup>32</sup>

## 2. Hak tersangka di dalam KUHAP.

Kitab undang-undang hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia mengakui hak tersangka untuk dibela oleh advokat dengan cara mengamati/mendampingi/menghubungi/mewakili/membela, tergantung keada jenis

---

<sup>31</sup>Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum (Cet. I; Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2000)*, h. 93-94.

<sup>32</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 Ayat (1)*.

perkara (misalnya perdata atau pidana), tingkatan perkara (misalnya masih di tingkat penyidikan/pnuntutan, atau sudah sampai di tingkat pengadilan), baik secara profesional (dengan pembayaran) maupun secara Cuma-Cuma (*pro deo*). KUHAP Indonesia mengatur tentang hak tersangka untuk dibela secara hukum:

a. Pasal 69 KUHAP

Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang ini.<sup>33</sup>

b. Pasal 70 ayat (1) KUHAP

Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.<sup>34</sup>

c. Pasal 71 KUHAP

Penasihat hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum dan petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraannya.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 69.*

<sup>34</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 70 Ayat (1).*

<sup>35</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 71.*



d. Pasal 72 KUHP

Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaanya.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup>Munir Fuady Dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h.31-32.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah gabungan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian perpustakaan dan penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan dan bukan dengan angka-angka.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Judul skripsi adalah Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Bulukumba sehingga lokasi penelitian yang digunakan adalah Pengadilan Negeri kelas I B Bulukumba, adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi pemberian layanan bantuan secara cuma-cuma oleh posbakum di Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba sejak di bentuknya posbakum.

## **B. Pendekatan Penelitian**

### **1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)**

Yaitu suatu metode yang menekankan pada suatu penelitian dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.<sup>1</sup> Pendekatan yuridis yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.

### **2. Pendekatan syar'i.**

Pendekatan *syar'i* adalah pendekatan yang menggunakan ilmu syariah terkhusus fiqh Islam yang terkait dengan implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Bulukumba Kelas I B yang dapat dijadikan sebagai acuan pembahasan.

## **C. Sumber Data**

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Data primer.**

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bulukumba dengan cara-cara *interview* yaitu kegiatan terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara

---

<sup>1</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, h. 3.

pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai bantuan hukum secara *prodeo* dan di dukung oleh data kuantitatif.

## 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui *library research* dengan jalan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. Metode ini menggunakan dua kutipan sebagai berikut:

### a) Kutipan langsung.

Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya.

### b) Kutipan tidak langsung.

Penulis mengutip pendapat orang lain dengan cara memformulasikan ke dalam susunan redaksi yang baru, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya, mengutip pendapat orang lain dengan cara meringkasnya tetapi inti dari pendapat tersebut tetap sama.

## **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian, dan penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba.<sup>2</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (pedoman wawancara).<sup>3</sup>

### 3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, video dan foto yang diambil pada saat penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba.

## **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen Penelitian adalah alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian.”<sup>4</sup>

Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara (*interview guide*) yang dibuat dalam bentuk daftar pertanyaan untuk wawancara
2. Kamera (*handphone*) berfungsi untuk memotret dan mengambil video peneliti ketika sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

<sup>2</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, h.140.

<sup>3</sup>Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h.193.

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian* (Makassar: Alauddin Press, 2013), h.17.

3. Buku Catatan dan alat tulis yakni alat yang digunakan untuk mencatat percakapan dengan sumber data.

#### **F. *Metode Analisis Data***

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis dengan tahapan, antara lain seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data dan penyusunan data. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Seleksi data, yaitu data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.
2. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapannya serta kejelasan.
3. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar memudahkan dalam mendeskripsikannya.
4. Penyusunan data, yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan.

Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek hasil penelitian dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Profil Pengadilan Negeri Bulukumba***

Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba merupakan salah satu lembaga peradilan yang terletak di wilayah hukum Kabupaten Bulukumba, Berikut profil dari Pengadilan Negeri Bulukumba:

##### **1. Sejarah Pengadilan Negeri Bulukumba.**

Pada awal mulanya pemerintah kolonial belanda masuk di daerah bulukumba sekitar pada tahun 1920 membangun dan mendirikan sebuah gedung sekolah bangsawan di jalan KH. Muhammad Ramli No. 1 kelurahan ujung bulu kabupaten Bulukumba yang dimana juga diantaranya termasuk pahlawan nasional SULTAN DAENG RADJA ikut sekolah di tempat itu pada tahun 1932 dengan nama sekolah rakyat bapemda (SWASANTARA) dan saat itu Indonesia merdeka dan maka gedung diserahkan oleh pemerintahan Indonesia dari pemerintahan Belanda pada tahun 1946 menjadi nama gedung kantor diberi nama (Latara) yang membawahi dua wilayah yaitu kabupaten Bantaeng dan kabupaten Bulukumba yang berpusat di kota Bulukumba pada saat itu dipimpin oleh bapak Hartoyo, SH. Pada tahun 1950 sampai tahun 1960 dan berubah nama menjadi Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah naungan Departemen Kehakiman pada tahun 1960 dan bapak hartoyo pensiun pada tahun 1965 digantikan oleh Bapak Ramlan, SH. Dari 1965 sampai pada tahun 1968 dan dibantu oleh dengan nama pengatur hukum atau dengan nama hakim muda dan pada saat itu bangunan gedung direhab dan diubah pada tahun 1968 sampai 1970

dibawah pimpinan ketua Bapak Andi Hayum, SH. Menjabat pada tahun 1969 sampai 1974 dan dilanjutkan Bapak Rijal, SH. Pada tahun 1975 sampai tahun 1977.

Dan digantikan oleh Bapak Gultom, SH. Dari tahun 1977 sampai tahun 1983 dan Pengadilan Negeri Bulukumba mendapatkan dana dari APBN untuk perluasan Gedung Kantor dan pindah terletak di jalan angka No. 2 Bulukumba kelurahan loka kecamatan ujung bulu dan saat itu Pengadilan Negeri Bulukumba sudah menjadi kelas II B saat itu pergantian pimpinan ketua oleh Syamsuddin Rasyid, SH. Dari tahun 1983 sampai tahun 1984 dan digantikan oleh bapak Andi Muhammad Yusuf, SH. Dari tahun 1985 sampai 1990 dan dijabat oleh bapak Sumijo, SH. Dari tahun 1991 sampai tahun 1994 saat itu telah menjadi Pengadilan Negeri Kelas II A Bulukumba.

Dan digantikan oleh bapak ketua Rahman, SH. Dari tahun 1993 samai tahun 1996 dan digantikan oleh Ibu Hajja Ona Siwa, SH. Dari 1996 sampai tahun 2000 dan idgantikan dan dijabat oleh bapak H. Abd. Karim, SH. Dari tahun 2000 sampai tahun 2004 dan digantikan oleh bapak H. Agus Sutarno, SH. Dari tahun 2004 sampai tahun 2006 dan digantikan oleh bapak Sutoto Hadi, SH. Tahun 2006 menjabat 6 bulan, pengadilan negeri Bulukumba berubah menjadi peningkatan kelas I B yang diresmikan ole bapak ketua mahkamah agung Prof, Dr. Bagir Mannan , SH. , MCL. Pada tanggal 7 maret 2005 dan berganti ketua pimpinan ketua pengadilan oleh bapak H. Hizbullah, SH. Dari tahun 2006 sampai tahun 2008 dan digantikan oleh bapak Achmad Sukandar, SH., MH. Tahun 2009 sampai 7 bulan saja dan digantikan lagi oleh bapak Ganjar Susilo, SH. Dari tahun 2011 sampai 2013 dan digantikan oleh bapak Lambertus Limbong, SH. Dari tahun 2013 sampai sampai tahun 2014 Arifin, SH., M.Hum. 7 bulan di tahun 2015 dan digantikan oleh bapak ketua Chris Fajar Sosiawan, SH., MH. dan wakil ketua bapak Khusaini, SH., MH. tahun 2015 sampai



2016, terakhir pada tahun 2016 Bapak Khusaini, SH.,MH. dari wakil ketua mendaot kenaikan pangkat menjadi ketua pengadilan negeri bulukumba dan saat ini gedung Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba terletak di Jalan Kenari No.5 Kabupaten Bulukumba.

## 2. Jabatan struktural Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba.

Adapun jabatan struktural Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai berikut:

<b>Ketua Pengadilan</b>	:	Khusaini, SH., MH.
<b>Wakil Ketua Pengadilan</b>	:	Sutiyono, SH., MH.
<b>Sekretaris</b>	:	Anwar Dahlan, SH., MH.
<b>Bendahara</b>	:	A. Dhadan Mirdan
<b>Hakim</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iwan Harry, SH., MH.</li> <li>2. Yusti C. Radjah, SH.</li> <li>3. Lely Triantini, SH., MH.</li> <li>4. Lulik Djatikumoro, SH., MH.</li> <li>5. Sera Achmad, SH., MH.</li> <li>6. Nursinah, SH., MH.</li> <li>7. Uwaisqarni, SH., MH.</li> </ol>
<b>Panitera</b>	:	H. Syahrir Dahlan, SH.
<b>PLT Panmud Pidana</b>	:	Muh. Syahrir, SH. Hamrawati, SH. (Staff) Syamsuarni. (Pramubakti)
<b>Panmud Perdata</b>	:	Abdul Halik, SH. Irma Zainuddin, SH., MH. (Pramubakti)

**Panmud Hukum** :

Rodding, SH.

Syamsuddin (Staff)

Kamsina (Pramubakti)

**Panitera Pengganti** :

1. Akhmad Basir, SH.

2. AM. Sulhidayat S, SH.

3. Haeruddin Madjid, SH., MH.

4. Jamaluddin, SH.

5. Hj. Rusydiyanti Hafni

6. Malikul Adil

7. Adi Anto, SH., MH.

**Juru Sita** :

1. Muh. Arifin

2. Syafaruddin

**Kasub TI dan Pelaporan** :

Rahijuddin Sahibe, SH.

Hermawan Agustiani, S.Si. (staff)

**Kasub Kepegawaian Dan Ortala:**

Rosmarini Tole, ST., SH.

A.Srilili Yarti, SH. (Pramubakti)

**Kasub Umum Dan Keuangan** :

Lenny, SH.

**Staff** :

Syahiruddin

**Pramubakti** :

1. Muliani, SH.

2. Syamsul, SH.

**Satpam** :

1. Supriadi

2. Sudirman, MH.

**Sopir Pengemudi** : Ardi, SH.

**Pesuruh** : Muhammad Ali

### 3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Bulukumba

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah otonom yang berada dalam wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis letak wilayah Kabupaten Bulukumba berjarak 153 km dari kota Makassar sebagai ibu kota propinsi Sulawesi Selatan, berada pada koordinat antara  $119^{\circ} 58'$  sampai dengan sampai dengan  $120^{\circ} 28'$  bujur timur antara  $05^{\circ} 2'$  sampai  $5^{\circ} 40'$  lintang selatan. Daerah ini beriklim tropika basah dengan temperatur rata-rata  $26,6^{\circ}$  berada antara suhu maksimal  $34^{\circ}$  C dan minimum  $21,1^{\circ}$  C, mempunyai dua jenis musim yakni musim kemarau dan musim hujan dengan kelembaban udara rata-rata  $27,4^{\circ}$  C.

Kabupaten Bulukumba yang dijuluki *Bumi Panrita Lopi* memiliki wilayah administrasi seluruhnya  $1.156,67 \text{ km}^2$  dengan batas-batas:

1. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kabupaten Sinjai
2. Sebelah Timur Berbatasan Teluk Bone
3. Sebelah Selatan Berbatasan Laut Flores
4. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kabupaten Bantaeng.

Didistribusikan ke dalam 10 Kecamatan, 28 Kelurahan dan 108 Desa.

10 Kecamatan di Kabupaten Bulukumba yaitu :

1.	Kecamatan Ujung Bulu	Terdiri Dari	9 Kelurahan
2.	Kecamatan Ujung Loe	Terdiri Dari	1 Kelurahan 12 Desa
3.	Kecamatan Gantarang	Terdiri Dari	3 Kelurahan 18 Desa
4.	Kecamatan Kindang	Terdiri Dari	1 Kelurahan 14 Desa
5.	Kecamatan Bulukumpa	Terdiri Dari	3 Kelurahan 14 Desa
6.	Kecamatan Rilau Ale	Terdiri Dari	2 Kelurahan 13 Desa
7.	Kecamatan Herlang	Terdiri Dari	2 Kelurahan 6 Desa
8.	Kecamatan Kajang	Terdiri Dari	2 Kelurahan 17 Desa
9.	Kecamatan Bonto Tiro	Terdiri Dari	1 Kelurahan 12 Desa
10.	Kecamatan Bonto Bahari	Terdiri Dari	4 Kelurahan 4 Desa

#### 4. VISI dan MISI Pengadilan Negeri Bulukumba

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang di inginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bulukumba.

a. Adapun VISI dari Pengadilan Negeri Bulukumba adalah:

**“MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”**

b. Adapun MISI dari Pengadilan Negeri Bulukumba adalah:

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- 4) Mewujudkan kredibilitas dan transparansi lembaga peradilan

Dalam rangka mewujudkan Visi Pengadilan Negeri Bulukumba dalam menetapkan tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan yang di tetapkan Pengadilan Negeri Bulukumba adalah:

- 1 Meningkatkan kemampuan dan kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan.
- 2 Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.

Dengan sasaran strategis adalah:

- a) Tercapaiya penyelesaian administrasi perkara tepat waktu.
- b) Tercapainya penyelesaian administrasi umum tepat waktu.
- c) Tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat.
- d) Tercapainya keterbukaan informasi tentang peradilan tentang pengadilan yang dapat diakses oleh publik.

**B. *Ketentuan Dan Jaminan Pemberian Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.***

Undang undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, merupakan salah satu undang-undang yang terkait dengan pemberian bantuan hukum yang dimana bantuan hukum ini diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu (miskin) yang terbelit dengan suatu persoalan hukum.

Adapun ketentuan-ketentuan serta jaminan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma atau tanpa biaya dalam uu no. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum akan di uraikan dibawah ini, antara lain :

a) Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang berikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.
2. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang diberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.

b) Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

c) Pasal 4

1. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
3. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan tindakan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/ atau tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

d) Pasal 5

1. Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan atau perumahan.

e) Pasal 6

1. Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelenggaraan permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.

f) Pasal 8

1. Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang.

2. Syarat-syarat pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Berbadan hukum
- b. Terakreditasi berdasarkan undang-undang ini
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
- d. Memiliki pengurus
- e. Memiliki program bantuan hukum

g) Pasal 12

Penerima bantuan hukum berhak:

1. Mendapatkan bantuan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa
2. Mendapatkan bantuan hukum sesuai standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat
3. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h) Pasal 13

Penerima bantuan hukum wajib:

1. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum
2. Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum



i) Pasal 20

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum.

j) Pasal 21

Pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

Beberapa pasal yang tidak diuraikan diatas yang terkait dengan jaminan dan ketentuan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu adapun itu yakni, salah satunya terkait persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dalam pasal 14 dan pasal 15 dalam undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, dikarenakan telah dibahas dalam bab lain pada skripsi ini.

Adapun ketentuan yang mengatur kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum terdapat dalam beberapa pasal dan undang-undang, antara lain :

- ) Pasal 22 ayat (1) undang-undang no. 18 tahun 2003 tentang advokat menyatakan bahwa “ advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.
- ) Pasal 2 peraturan pemerintah no. 83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma juga menyatakan bahwa, “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma bagi para pencari keadilan”.

) Pasal 12 ayat (1) peraturan pemerintah no 83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum selanjutnya juga menegaskan bahwa, “advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara Cuma-Cuma”.

) Berdasarkan peraturan perhimpunan advokat indonesia no. 1 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang berlaku pada organisasi advokat menyatakan bahwa, advokat PERADI dianjurkan melakukan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma sebanyak 50/tahun.

Ketentuan-ketentuan ini telah menunjukkan secara tegas bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin.

### ***C. Implementasi dan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Negeri Bulukumba Kelas I B***

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Negara berkewajiban memberikan pelayanan bantuan hukum dan menanggung biaya perkara bagi para pencari keadilan yang tidak mampu. Dalam hal pemberian bantuan hukum di pengadilan dikenal dengan istilah Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM).

Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa Informasi, Konsultasi, dan Advis Hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha Negara.<sup>1</sup>

Jauh sebelum adanya posbakum para hakim sudah mengenal dan melaksanakan persamaan hak dihadapan hukum dikarenakan hal itu merupakan kewajiban majelis hakim untuk mengingatkan hak bagi terdakwa di hadapan persidangan.<sup>2</sup>

### **1. Posbakum Pengadilan Negeri Bulukumba Kelas I B**

Berdasarkan kelanjutan dari SK Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor W22-U11/69/HT.01-10/II/2016 Tanggal 09 Februari 2016 tentang pembentukan panitia seleksi Lembaga Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menyelenggarakan seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), dan hasil seleksi tersebut maka di umumkanlah berdasarkan berita acara evaluasi dan seleksi pemberi layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari rabu tanggal 17 Februari 2016, dengan menyatakan dan mengumumkan bahwa yang paling memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana yang di tentukan adalah:

#### **“YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINAR KEADILAN”**

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan merupakan salah satu lembaga bantuan hukum yang ada di wilayah hukum Bulukumba Yang telah memenuhi persyaratan sebagai lembaga penyedia layanan pos bantuan hukum dan

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*, Pasal 1 Angka 6.

<sup>2</sup>Yusti C. Radjah, Hakim Dan Humas Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 18 September 2017.

bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai lembaga bantuan hukum yang berkantor dan bertugas di POSBAKUM Pengadilan Negeri Bulukumba, untuk memberi pelayanan hukum kepada para pencari keadilan di wilayah hukum di Pengadilan Negeri Bulukumba.<sup>3</sup>

Posbakum Yang Ada Di Pengadilan Negeri Bulukumba memiliki susunan struktur sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. **Direktur** : Zainuddin Batoi, SH.
2. **Sekretaris** : Rudy Zainuddin, SH.
3. **Bendahara** : Ny. Suhary
4. **Anggota** : Tahiruddin, SH., MH.  
Hendra Wahyudi, SH.  
Ahmad Kurnia, SH.  
Abd. Rahman Razak, SH.  
Rafidah Fahmy, SH.  
Rachman Kartolo, SH.  
Baharuddin M, SH.  
Bakri, SH.

Dalam hal pelaksanaan layanan bantuan hukum oleh Posbakum yang bekerja sama dengan pihak Pengadilan Negeri Bulukumba, Posbakum membagi atas dua pemberian bantuan hukum yakni, pemberian bantuan hukum secara Litigasi dan

---

<sup>3</sup>Zainuddin Batoi, Ketua Posbakum Di Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 18 September 2017.

<sup>4</sup>Zainuddin Batoi, Ketua Posbakum Di Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 18 September 2017.

pemberian bantuan hukum secara Nonlitigasi.<sup>5</sup> Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a) Pemberian bantuan hukum secara litigasi.

Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan dengan cara:

- 1) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan.
- 2) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- 3) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di pengadilan tata usaha Negara.

b) Pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi.

Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Pemberian bantuan hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, Paralegal, Dosen, Dan Mahasiswa Fakultas Hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.

Pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi meliputi kegiatan:

- 1) Penyuluhan hukum;
- 2) Konsultasi hukum;
- 3) Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- 4) Penelitian hukum;

---

<sup>5</sup>Yusti C. Radjah, Hakim Dan Humas Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 18 September 2017.

- 5) Mediasi;
- 6) Negosiasi;
- 7) Pemberdayaan masyarakat;
- 8) Pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
- 9) *Drafting* dokumen hukum.

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Hakim sekaligus HUMAS Pengadilan Negeri Bulukumba dalam wawancaranya, mengatakan bahwa “pihak pengadilan Bulukumba maupun pihak dari posbakum sudah sering melaksanakan layanan terhadap bantuan hukum seperti, penyuluhan dan penerangan hukum kepada (masyarakat, wartawan, dan kepada siswa-siswi di sekolah-sekolah, dll), sidang di tempat, pendampingan kepada tersangka/terdakwa hingga memperoleh putusan tetap, serta memberikan informasi kepada para pencari keadilan yang datang ke pengadilan dan belum mengetahui tentang bagaimana proses perkara maupun persidangan. Untuk itu tidak perlu lagi masyarakat atau para pencari keadilan untuk ragu dan sungkan terlebih lagi kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi yang menjadi tersangka/terdakwa yang di dampingi oleh penasehat hukum ataupun advokat untuk datang ke Pengadilan Negeri Bulukumba karena pihak Pengadilan Negeri Bulukumba dan Posbakum yang bertugas di Pengadilan Negeri Bulukumba membuka diri untuk hal ini terkhusus pelayanan bantuan hukum.”<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Yusti C. Radjah, Hakim Dan Humas Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 18 September 2017.

## **2. Prosedur Pemberian Bantuan Hukum Oleh Posbakum Pengadilan Negeri Bulukumba Kelas I B**

Dari hasil wawancara dalam melaksanakan tugasnya Posbakum yang ada di Pengadilan Negeri Bulukumba memiliki prosedur dalam implementasi pemberian bantuan hukum secara Cuma-cuma yaitu:<sup>7</sup>

1. Kartu tanda penduduk
2. Surat pernyataan tidak mampu membayar pengacara
3. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa setempat

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan dan layanan hukum ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi para pencari keadilan untuk mendapatkan layanan bantuan hukum baik pada kasus perdata dapat dilihat pada pasal 9 PERMA No. 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Sedangkan pada kasus pidana dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.<sup>8</sup>

- a. Prosedur pembebasan biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama pada kasus perdata diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2014 (pasal 9), berbunyi :

Prosedur layanan pembebasan biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama antara lain :

- 1) Dalam hal perkara perdata, perdata agama dan tata usaha Negara, penggugat/pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya

---

<sup>7</sup>Zainuddin Batoi, Ketua Posbakum Di Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 18 September 2017.

<sup>8</sup>Yusti C. Radjah, Hakim Dan Humas Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 18 September 2017.

perkara sebelum sidang pertama secara tertulis atau sebelum sidang persiapan khusus untuk perkara tata usaha Negara.

- 2) Apabila tergugat /termohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka permohonan itu disampaikan secara tertulis sebelum menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat/pemohon.
  - 3) Pemohon pembebasan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2).
  - 4) Panitera/ sekertaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran.
  - 5) Ketua pengadilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan panitera/sekertaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan mengeluarkan surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan.
  - 6) Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.
  - 7) Penetapan layanan pembebasan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk perkara yang sama yang diajukan ke tingkat banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
- b. Prosedur pembebasan biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama pada perkara pidana yakni :

Pemberian bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha Negara , baik secara



litigasi maupun nonlitigasi dan pemberian bantuan hukum yang diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan.<sup>9</sup>

Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum paling sedikit memuat:<sup>10</sup>

- 1) Identitas pemohon bantuan hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas, pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum.
- 2) Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum.

Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud harus melampirkan:

- 1) Surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan

---

<sup>9</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah, Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pasal 5 Ayat 1 dan 2.*

<sup>10</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah, Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pasal 6 Ayat 1, 2 Dan 3.*

masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin

2) Dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki persyaratan tersebut. Instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain untuk keperluan penerimaan bantuan hukum.

Lurah, Kepala Desa, atau Pejabat yang setingkat sesuai domisili pemberi bantuan hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin untuk keperluan penerimaan bantuan hukum.

Pemohon bantuan hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dapat mengajukan permohonan secara lisan. Dalam hal permohonan bantuan hukum diajukan secara lisan, pemberi bantuan hukum menuangkan dalam bentuk tertulis. Permohonan ditanda tangani atau dicap jempol oleh pemohon bantuan hukum.

Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.

Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

### **3. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pelaksanaan layanan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba.**

Dalam melaksanakan pelayanan bantuan hukum, pihak posbakum maupun pihak pengadilan negeri memiliki pandangan tersendiri terhadap faktor pendukung maupun kendala yang ditemui di lapangan, berikut uraiannya:

#### **a. Pihak Pengadilan Negeri Bulukumba.<sup>11</sup>**

##### **1) Faktor pendukung:**

Adapun faktor pendukung pihak pengadilan terkait dengan adanya pemberian layanan bantuan hukum yakni, Respon dari masyarakat para pencari keadilan makin baik dan meningkat sejak dibentuknya dan berkantornya posbakum di Pengadilan Negeri Bulukumba.

##### **2) Kendala:**

- a) Mata anggaran yang masih minim dikarenakan biaya yang dibutuhkan untuk memberikan gaji kepada advokat yang bertugas di posbakum

---

<sup>11</sup>Yusti C. Radjah, Hakim Dan Humas Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 18 September 2017.

pengadilan Bulukumba maupun pembebasan biaya perkara yang dibutuhkan dan yang tersedia masih belum mencukupi.

- b) Masih sulitnya mengatur jadwal antara advokat yang beracara secara cuma-cuma dengan yang dibayar, dikarenakan masih adanya advokat yang bertugas di posbakum pengadilan negeri Bulukumba yang memiliki jadwal beracara diluar dari tugasnya sebagai advokat yang bertugas di posbakum. Namun hal ini masih bisa diatasi oleh pihak pengadilan dan posbakum dengan cara membuat jadwal piket setiap hari kerja (senin-jum'at) dalam seminggu.

b. Pihak Posbakum Pengadilan Negeri Bulukumba.<sup>12</sup>

1. Faktor pendukung

Dalam pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum oleh pihak Posbakum baik secara litigasi maupun nonlitigasi pihak Posbakum senantiasa mendapatkan Dukungan penuh dari pihak Pengadilan Negeri Bulukumba.

2. Kendala

Terkadang terdakwa tidak ingin dan menolak untuk di dampingi oleh advokat/penasehat hukum, akan tetapi kejadian ini hanya terjadi pada kasus (Narkotika) saja dan tidak ada alasan yang jelas mengapa mereka menolak di dampingi oleh advokat/penasehat hukum yan bertugas oleh posbakum baik secara cuma-cuma maupun yang memakai jasa advokat yang dibayar. Namun pada kasus pidana maupun kasus perdata para pencari keadilan yang datang ke pengadilan tetap merespon dengan baik dengan adanya posbakum di Pengadilan Negeri Bulukumba.

---

<sup>12</sup>Zainuddin Batoi, Ketua Posbakum Di Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, 18 September 2017.

#### 4. Jumlah Kasus Yang Telah Di Tangani Oleh Posbakum Pengadilan Negeri Bulukumba (2016-2017)

Berdasarkan Dari hasil wawancara dan perngambilan data di Pengadilan Negeri Bulukumba, Sejak bertugas dan berkantornya posbakum Di Pengadilan Negeri Bulukumba hingga saat ini, beberapa perkara telah di tangani dan pelayanan hukum berkat kerjasama dari pihak pengadilan, pemerintah setempat dan masyarakat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba. Berikut data yang diperoleh.

**Tabel I**  
**Jumlah Data perkara yang di berikan layanan bantuan hukum oleh posbakum tahun 2016**

No	Perkara	Jumlah kasus (perkara)
1	Pidana	54
2	Perdata	2
3	Non litigasi	4
	<b>Jumlah</b>	<b>60</b>

**Tabel II**  
**Jumlah Data perkara yang di berikan layanan bantuan hukum oleh posbakum tahun 2017**

No	Perkara	Jumlah Kasus (Perkara)
1	Pidana	13
2	Perdata	2
3	Non Litigasi	2
	<b>Jumlah</b>	<b>17</b>

Berikut nama-nama penerima layanan bantuan hukum oleh posbakum di Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba pada tahun 2016-2017.

a. Penerima layanan bantuan hukum pada tahun 2016.

Perkara Pidana

- ) Asdar Bin ABD. Rasyid
- ) Basran Bin Wahab
- ) Aswan Alias Tawang Bin Ahmad Agus
- ) Muh. Syahrir Bin Saradding
- ) Akmal Bin Muh. Amir
- ) Adiyanto Alias Mas Anto Bin Tumini
- ) Alber Bin Muh. Saleh
- ) Misu Bin Saneni
- ) Restu Hidayat Bin Rampe
- ) Iswandi Bin Nure
- ) Fajar Nurhidayat Alias Fajar Bin Ambo Tuo
- ) Sandi Bin Acca
- ) Andi Amral Nurjaya Ambo Sakka
- ) Amirullah Alias Bijé Bin Amiruddin
- ) H. Sofyan Bin H. Lassa
- ) Pratiwi Bin Samire
- ) M. Darwis Alias Ato Lebba Bin Daud
- ) Harmawati Bin Marjuni (Dalam Proses)
- ) Saparuddin Bin Sammaila (Dalam Proses)
- ) Dedi Setiawan Alias Dedi Tegar Bin Awaluddin

- ) Suhardi Alias Adi Bin Tahiro Dg. Sitaba (Dalam Proses)
- ) Jusnaedi Alias Edi Bin. Jumaring
- ) Suardi Bin Palego
- ) Aco Sanihi Alias Aco Bin Sanihi
- ) Sirajuddin Alias Jaju Bin M. Ramli
- ) Zul Amrul Bin Dandung Bin A. Sirman
- ) Jubahrir Alias Bair Bin Baharuddin
- ) Fahru Roji Alias Ako Bin Alimuddin
- ) Pardi Alias Parjo Bin Daud
- ) Sabri Saputra Alias Abi Bin Alimuddin
- ) ABD. Ganing Bin Cengke
- ) Zulfikar Alias Fikar Bin Sampara
- ) MUH. Ridwan Alias Aco Bin Andi Baso Cella
- ) Elly Kurniawan Alias Elly Bin Bahtiar Tomo
- ) Budu Bin Mange
- ) Irham Syamri Alias Meru' Bin Amiruddin
- ) Syamsir Alias Anci Bin Baharuddin
- ) Ari Handayani Alias Ari Bin Anwar
- ) A. Dadang Bin A. Zainal Nobong
- ) ABD. Wahid Syam Alias Wahid Bin Suddin
- ) Rusli Bin Dg. Tusso
- ) Syamsir Alias Anci Bin Dg. Naba
- ) Adi Bin Slamet Bin Rahmat
- ) Rismayanti Binti Nasrun

- ↳ Imam Rianmicas Hatami Alias Iyank Bin Akbar
- ↳ Agung Saputra Alias Agung Bin Pardi
- ↳ Muh. Alimuddin Bun Laenre Alias Ami
- ↳ Rosanti Alias Santi Binti Abd. Samad
- ↳ Sandi Bin Sanji
- ↳ Maming Alias Buto Bin Hasaning Makka
- ↳ Kamaruddin Alias Kama Bin Laba
- ↳ Ansar Alias Andi Bin Ambo Sakka
- ↳ Sapriadi Alias Appi Bin Syahrir

#### Perkara Perdata

- ↳ Diring
- ↳ Faridah Bin Laupa (Dalam Proses)

#### Penyuluhan

- ↳ 4 (Empat) Kali

#### b. Penerima layanan bantuan hukum pada tahun 2017

##### Perkara Pidana

- ↳ Muh. Aso Alias Aso Bin Muh. Amin (Dalam Proses)
- ↳ Asriadi Salahuddin
- ↳ Widya Astuti Alias Widi Binti Mustamin
- ↳ Ardiansyah Alias Allea Bin Mansyur
- ↳ Muh. Fajar Alias Fajar Nyinga' Alias Fajar Bolong Bin H. Nyinga'



- ) Ihwan Nur Alias Iwan Bin Nurdin
- ) Fahmi Indrawan Alias Fahmi Bin Aco
- ) Ady Tawang Alias Andi Ledeng Bin Mantari Dg. Ledeng
- ) Sukardi Alias Ka'di Bin H. Kade
- ) Sirajuddin Alias Ato Bin H. Bahrir
- ) Sappewali Alias Samoe Bin Sauna
- ) Firman Anggara Alias Firman Bin Muh. Sabil
- ) Rudi Hardianto Bin Basir

#### Perkara Perdata

- ) H. Tuba
- ) Darmawati Binti Nompo

#### Penyuluhan

- ) 2 (Dua) Kali

#### ***D. Pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma di Pengadilan Negeri Bulukumba***

Dari awal perkembangannya hingga saat ini, bantuan hukum memang banyak orang tidak dapat memahami, terutama masyarakat awam, kenapa orang yang dituduh sudah melakukan tindak pidana, bahkan mereka yang sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang sudah berekuatan hukum pasti masih saja dilindungi oleh hukum, masih ada hak asasinya yang tidak boleh diotak-atik. Ya, memang demikianlah cara kita hidup dalam negara hukum dan demokrasi yang berperadaban dalam hal ini,

jangankan manusia sebagai makhluk tuhan yang paling mulia atau khalifah dunia, bahkan hewan pun tidak boleh diberlakukan sembarangan .

“Al-Qur’an adalah sumber asal dan sunnah adalah sumber penjas”, dan setiap apa yang disebutkan dalam hadist-hadist tentang prinsip persamaan dan sikap bijaksana, sopan santun, dan nasihat maka asalnya pasti ada dalam al-qur’an. Sedangkan pembicaraan dalam hadist-hadist itu, bisa mengulang dan menyebutkan, atau bisa menjelaskan dan merincikan.<sup>13</sup>

Perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) telah lama dikenal dalam Islam. Perlindungan terhadap hak asasi manusia ini merupakan salah satu bentuk dari upaya penegakan keadilan. Jika ditelaah lebih dalam, banyak ayat Al-Qur’an maupun As-Sunnah yang menjadi dasar tersebut diantaranya Q.S Al-An’am: 151 yang menjadi dasar hak untuk hidup, Q.S Al-hujurat: 13 yang menjadi dasar adanya hak persamaan derajat, Q.S Al-Maidah: 2 dan 8 yang menjadi dasar adanya hak memperoleh keadilan, Q.S Al-Baqarah: 188 yang menjadi dasar adanya hak perlindungan harta dan milik, Q.S Al-Baqarah 256 dan Yunus: 99 yang menjadi dasar adanya hak kebebasan beragama, serta masih banyak lagi ayat Al-Qur’an yang mengisyaratkan pemenuhan hak-hak manusia menurut fitrahnya.<sup>14</sup>

Adapun dasar hukum untuk Persamaan hak di muka hukum dalam hukum Islam disamakan halnya dengan hak memperoleh keadilan. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al-Maidah/5 : 2 yaitu :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

<sup>13</sup>Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Cet. I; Jakarta: AMZAH ,2005), h.234.

<sup>14</sup>Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam* , h. 36.

Terjemahnya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>15</sup>

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa bagaimana kita diwajibkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, termasuk dalam hal menerapkan Hukum Islam. Jadi keberadaan seorang penasehat hukum dalam Hukum Islam adalah dalam rangka menegakkan kebajikan dan aturan hukum Allah SWT.

Agama manapun di dunia ini selalu mengajarkan ummatnya untuk membantu orang-orang miskin. Bukan saja membantu dari sisi materi, tetapi juga membantu mereka menghadapi berbagai persoalan hidup. Dalam konteks Hukum Islam, memahami bantuan hukum dalam Islam tidak sesederhana yang dipahami dalam konteks hukum barat. Istilah bantuan hukum dekat maknanya dengan konsep *al-mahami* yang bisa diartikan sebagai pengacara, tetapi juga dekat artinya dengan penegak hukum.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, kewajiban untuk pemberian pelayanan bantuan hukum, khususnya kepada para pencari keadilan yang memiliki kemampuan ekonomi di bawah juga merupakan suatu kewajiban dan dengan tujuan meringankan beban orang yang sedang terbelit suatu perkara hukum. Selanjutnya firman Allah dalam QS Al Maidah/5 : 8 yaitu :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

<sup>15</sup>Kementrian Agama RI, *Al-quran Terjemhan dan Tafsir* (Bandung: Syamil Quran, 2011), h.106

<sup>16</sup>Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam Profesi Kepengacaraan Dalam Islam Dan Praktiknya Di Lingkungan Pengadilan* (Cet, I; Bandung: Pustaka Setia , 2012), H. 49.

Terjemahnya:

“Hai orang-orang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>17</sup>

Dari ayat diatas dpat ditarik suatu makna bahwa memang senantiasa dituntut dan mewajibkan untuk berlaku adil dalam keadaan apapun dan termasuk dalam hal membantu dan memberikan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat yang sedang membutuhkan informasi terkait dengan hukum ataupun yang membutuhkan bantuan hukum dalam hal didampingi oleh penasehat hukum..

Sebagaimana dalam hadits dari abu hurairah dan diriwayatkan oleh muslim.

Rasulullah bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

Artinya:

"Barangsiapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan

<sup>17</sup>Kementrian Agama RI, *Al-quran Terjemahan dan Tafsir*, h. 108

menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya."(Muslim dari Abu Hurairah)<sup>18</sup>

Pada hadist di atas dapat diambil suatu makna dan kesimpulan bahwa melapangkan seorang manusia dari kesusahan atau masalah yang sedang dihadapinya maka Allah SWT akan melapangkannya dari salah satu kesusahannya di hari kiamat kelak. Hal ini sejalan dengan kewajiban untuk membantu para pencari keadilan dalam hal memberi bantuan hukum baik secara litigasi maupun nonlitigasi terlebih lagi ketika orang tersebut dalam golongan taraf ekonomi rendah yang sedang dalam menghadapi persoalan hukum.

Dalam proses peradilan, perlindungan terhadap HAM juga berhak dimiliki oleh seorang tersangka atau terdakwa, perlindungan ini meliputi dalam hal pelaksanaan hak di muka hukum, Hukum Islam memberi jaminan kepada tersangka terdakwa adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Hak untuk membela diri, hak ini merupakan hak yang sangat penting karena dengan adanya terdakwa dapat menyangkal tuduhan terhadapnya baik melalui bantahan terhadap bukti yang memberikan atau mengajukan bukti untuk pembebasan (seperti suatu alibi).
2. Hak pemeriksaan pengadilan (*The Right To Judicial Trial*), hak ini merupakan hak bagi terdakwa untuk diadili di muka persidangan dan diadili secara terbuka.
3. Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, merupakan bentuk mewujudkan keadilan dan kesamaan di antara manusia termasuk terdakwa.
4. Hak untuk meminta ganti rugi karena putusan yang salah. Dalam hal ini jika seseorang hakim menjatuhkan putusan yang salah secara tidak sengaja,

---

<sup>18</sup>Al-Hafizh Ahmad bin Hajar al-asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*, (Jakarta: Darul Haq, 2014), h. 807.

<sup>19</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukuum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 51-64

terhukum berhak atas kompensasi dari baitul maal (perbendaharaan negara) sebagai tambahan haknya untuk banding dan pengaduan kepada *wali al-Mazalim*.

5. Kayakinan sebagai dasar dari terbuktinya kejahatan, hukum Islam meletakkan asas praduga tidak bersalah sebagai landasan dari aturan-aturan pidana substansi dan prosedural. Sebagai konsekuensinya, keragaman dapat menjadi dasar untuk putusan bebas dan tidak dapat menjadi dasar bagi terbuktinya kejahatan

Allah SWT menjadikan *al-'Adl* (berlaku adil) dan *al-Qish* sama artinya, sebab hal itu merupakan dasar setiap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana dari prinsip-prinsip menyeluruh dan kaidah-kaidah umum dalam syariat-Nya. Hal itu adalah sistem Allah dari syariat-Nya, dan atas dasarnya dunia dan akhirat manusia akan beruntung.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil dari penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IB Bulukumba, bahwa pencanangan dan pengimplementasian pelayanan bantuan hukum baik secara litigasi maupun nonlitigasi sejak 2016 lalu hingga saat ini sudah berjalan secara bertahap dan telah menyelesaikan beberapa kasus hingga adanya putusan tetap terutama terkait dengan bantuan hukum secara cuma-cuma, dan pihak Pengadilan Negeri Bulukumba dan Posbakum juga telah sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat khususnya yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba.

---

<sup>20</sup>Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, h.200.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim sekaligus Humas Pengadilan Negeri Bulukumba Kelas I B, bahwa persamaan hak bagi seluruh elemen masyarakat khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi, tidak boleh ada perbedaan pelayanan antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu dalam mengakses layanan bantuan hukum. Karena pada hakikatnya seluruh warga Negara sama dihadapan hukum.<sup>21</sup>

Hal ini berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam pasal 28 D (1), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>22</sup> dimana setiap orang tidak boleh mendapatkan perlakuan yang berbeda di hadapan hukum.

Perbedaan tingkat dan kedudukan sosial serta perbedaan nasib dalam rezeki, sekali-kali tidak dapat dan tidak boleh menjadi alasan untuk memperbedakan hak seseorang di muka hukum, baik hukum manusia maupun hukum Tuhan.<sup>23</sup>

Dengan terlaksananya pemberian layanan hukum bagi para pencari keadilan baik secara litigasi maupun nonlitigasi , baik itu kepada masyarakat yang mampu maupun yang tidak mampu dari segi taraf ekonomis, maka dalam hal ini, persamaan hak di muka hukum yang merupakan salah satu ajaran pokok dalam hukum Islam. Baik yang menyangkut soal ibadah dalam arti yang terbatas, yakni hubungan antara makhluk dan khaliknya maupun dalam arti yang luas, yakni hubungan *mu'amalat* antar manusia., Hukum Islam mengakui dan menegakkan prinsip adanya persamaan hak di muka hukum untuk semua umat manusia.

---

<sup>21</sup>Yusti C. Radjah, Hakim Dan Humas Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 18 September 2017.

<sup>22</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 28 D Ayat 1

<sup>23</sup>Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya* (Cet, II; Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), h.214

Sehingga dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa dengan terealisasinya pemberian layanan bantuan hukum oleh Posbakum Pengadilan Negeri Bulukumba telah sesuai dan sejalan dengan Hukum Islam mengenai persamaan hak di hadapan hukum bagi seluruh umat manusia.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat ditarik dan disimpulkan bahwa:

1. Ketentuan dan jaminan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yakni, memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan bantuan serta informasi terkait suatu permasalahan hukum yang sedang dihadapinya baik itu secara litigasi maupun secara nonlitigasi. Sebagaimana hal ini dilaksanakan agar persamaan hak dan keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia dihadapan hukum dapat terwujud agar tidak ada lagi yang terjadi diskriminasi terhadap kaum miskin dalam megakses keadilan.
2. Implementasi pemberian bantuan hukum oleh Pos bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba, yang telah dibuka sejak tahun 2016 hingga saat ini dan telah menangani kasus-kasus perkara baik secara litigasi maupun nonlitigasi, dimana pada tahun 2016 sebanyak 60 perkara yang terbagi atas jalur Litigasi (Pidana 54 dan perdata 2) dan jalur Nonlitigasi sebanyak 4 kali penyuluhan, dan pada tahun 2017 sebanyak 17 perkara yang terbagi atas jalur Litigasi (Pidana 13 dan Perdata 2) dan jalur nonlitigasi sebanyak 2 kali penyuluhan..
3. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba, sebagai wujud persamaan hak di hadapan hukum kepada para pencari keadilan, telah sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam yang mewajibkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan tidak membedakan hak antara kaum yang kaya dan kaum yang miskin. Dengan

terlaksananya pemberian layanan hukum bagi para pencari keadilan baik secara litigasi maupun nonlitigasi, baik kepada masyarakat yang mampu maupun yang tidak mampu dari segi taraf ekonomi, maka dalam hal ini, persamaan hak di muka hukum yang merupakan salah satu ajaran pokok dalam hukum Islam. Baik yang menyangkut soal ibadah dalam arti yang terbatas, yakni hubungan antara makhluk dan khaliknya maupun dalam arti yang luas, yakni hubungan *mu'amalat* antar manusia., Hukum Islam mengakui dan menegakkan prinsip adanya persamaan hak di muka hukum untuk semua umat manusia.

### **B. Implikasi Penelitian**

Adapun implikasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya penambahan anggaran dari Mahkamah Agung dalam hal pemberian bantuan hukum, dikarenakan pembebasan biaya perkara bagi para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Bulukumba masih belum mencukupi.
2. Diperlukan kerjasama yang lebih efektif lagi kedepannya antara pihak Posbakum dan pihak Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.
3. Diperlukan peran serta semua pihak yang berada di Wilayah Hukum Kabupaten Bulukumba agar asas persamaan hak bagi seluruh masyarakat dapat meningkat.
4. Diperlukan peran serta masyarakat untuk mendukung program layanan bantuan hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba agar tercipta masyarakat yang sadar hukum khususnya di Wilayah Hukum Kabupaten Bulukumba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. 7; Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Santoso Az, Lukman. *Buku Pintar Beracara*. Cet. I ; Jogjakarta: Flashbooks, 2014.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Teori Negara Hukum*. Cet. I : Malang ;Setara Press, 2016.
- Kansil, C.S.T.,*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. VII;Jakarta:Balai Pustaka, 1986.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir*. Bandung: Syamil Quran, 2011.
- Marwan, M dan Jimmy P. *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*. Cet. I; Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Cet. I:Jakarta; Prenada Media Group, 2015.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung: alumni, 1983.
- Sairin, Weinata. *Himpunan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan Tentang Advokat*. Cet. I; Bandung:Yrama Widya.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 10; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum..* Jakarta; PT.Elex Media Komputindo, 2000.
- Harjono, Anwar. *Hukum Islam Keluasaan Dan Keadilannya*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: AMZAH, 2005.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*. Jakarta Pusat :YLBHI, 2013.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* , Bandung: Alfabet, 2009.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sofyan, Andi Dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

- Kusnadi Didi. *Bantuan Hukum Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2010.
- Amiruddin dan zainal asikin, *pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian*. Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*.
- Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman Bantuan Hukum*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Lampiran Dokumentasi



J) **Keterangan: Tampak Kantor Pengadilan Negeri Bulukumba Kelas IB**  
**(Bulukumba, 18 September 2017)**





) Visi misi dan struktur organisasi Pengadilan Negeri Bulukumba  
(Bulukumba, 18 September 2017).



) Papan Informasi Bantuan Hukum di Pengadilan Bulukumba  
(Bulukumba, 18 September 2017)







) Alur Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Bulukumba, 18 September 2017)



) Alur Penyelesaian Perkara Perdata (Bulukumba, 18 September 2017)





) Wawancara dengan bapak Zainuddin Batoi, Direktur Posbakum Di Pengadilan Negeri Bulukumba Kelas I B, (Bulukumba, 18 September 2017).



) Foto Bersama Direktur Posbakum Pengadilan Negeri Bulukumba (Bulukumba, 18 September 2017)



) Wawancara Dengan Bapak (Yusti C. Radjah) Hakim Sekaligus Humas Pengadilan Negeri Bulukumba (*Bulukumba, 18 September 2017*)



) Foto Bersama Hakim Sekaligus Humas Pengadilan Negeri Bulukumba (*Bulukumba, 18 September 2017*).



## 2. Surat Keterangan

**PENGESAHAN DRAFT PROPOSAL**

Nomor: /HPK/2017

Judul Skripsi: : Analisis Yuridis Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma di Pengadilan Negeri Bulukumba (UU No. 16 Tahun. 2011).

Gowa, 18 Juli 2017

**Penyusup,**  
  
Muhammad Risman  
Nim. 10300113005

**Pembimbing I**  
  
Dr. Dedyung Abdullah, M.Ag  
Nip. 19720302 200501 1 005

**Pembimbing II**  
  
Abd. Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D  
Nip. 19731231 200501 1 034

Diketahui Oleh:  
**Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan**  
  
Dra. Nila Sastrawati, M.Si  
Nip. 19710712 199703 2 002

Disahkan Oleh:  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**  
**UIN Alauddin Makassar**  
  
Darussalam, M. Ag  
Nip. 19621016 1990031 003



) Surat Pengesahan Draft Proposal (Gowa, 18 Juli 2017)



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923  
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 424835 Fax. 424836

Nomor : SL.I/PP.00.9/ ~~07~~ 2017

Samata, 7 September 2017

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

*Kepada*

*Yth* Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan  
Cq. Kepala UPT P2t, BKPM D Prov. Sul-Sel.

Di  
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Muhammad Risman
Nim	: 10300113005
Fakultas/jurusan	: Syariah Dan Hukum / HPK
Semester	: IX (sembilan)
Alamat	: Jl. Borong Raya

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya :

**Analisis Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh  
POSBKUM di Pengadilan Negeri Bulukumba**

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Dudung Abdullah, M.Ag  
2. Abd. Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D


Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bulukumba terhitung mulai tanggal 11 September 2017 s/d 11 Oktober 2017.

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak di ucapkan terima kasih.

Wassalam

Samata, 7-9-2017

An. Rektor  
Dekan Fakultas Syariah & Hukum

  
Prof. Dr. Darussalam, M. Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003

) Surat Permohonan Izin Penelitian (Samata, 7 September 2017)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 13479/S.01P/P2T/09/2017  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.  
Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : SI.1/PP.00.9/3576/2017 tanggal 07 September 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD RISMAN  
Nomor Pokok : 10300113005  
Program Studi : HPK  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 63 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA OLEH POSBAKUM DI PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **11 September s/d 11 Oktober 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 08 September 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan 13h  
1. Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
2. Peringgal

) Surat Izin Penelitian (Makassar, 08 September 2017)



**PENGADILAN NEGERI KELAS I B BULUKUMBA**

Jalan Kenari No. 5 Telepon : 0413-81022 & 81050 • FAX : 0413-81249

**KABUPATEN BULUKUMBA**

**SURAT KETERANGAN**

**No. W22-U11/465/HK-08-02/X /2017**

Wakil ketua Pengadilan Negeri Bulukumba menerangkan bahwa :

N a m a : **MUHAMMAD RISMAN**  
NIM : **10300113005**  
Program Studi : **S1 (Sarjana Hukum)**  
Konsentrasi : **Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan**

Bahwa yang tersebut namanya di atas benar telah melakukan penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Bulukumba dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA OLEH POSBAKUM DI PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA"** pada tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Bulukumba, 11 Oktober 2017

PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA

WAKIL KETUA,



SUTTYONO, SH, MH.

NIP. 196408121992121001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

) Surat Keterangan Penelitian (Bulukumba, 11 Oktober 2017)



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Muhammad Risman**, lahir di Bulukumba, tepatnya di Desa Salassae, Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba, pada tanggal 16 September 1995. Penulis adalah Anak Tunggal dari H. Salman dan Hj. St. Nasria. Penulis pertama kali menginjakkan kakinya di dunia pendidikan formal pada tahun 2002 di SDN Ngapaboa Kec. Topoyo dan tamat pada tahun 2007.

Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 3 Budong-budong Kec. Topoyo, dan Tamat pada tahun 2010.

Kemudian pada tahun itu juga, Penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Topoyo. Kabupaten Mamuju Tengah dan lulus Pada tahun 2013, Pada tahun itu pula Penulis diterima dan terdaftar sebagai salah satu Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana Dan Ketata Negaraan.

Dengan status Mahasiswa, penulis yang gemar dengan diskusi ini, memanfaatkan sebaik-baiknya untuk belajar hukum dengan memasuki beberapa organisasi, baik itu organisasi ekstra kampus maupun organisasi intra kampus, penulis juga aktif dalam organisasi daerah (ORGANDA) yang berasal dari Mamuju Tengah. menurut penulis jika seorang mahasiswa yang hanya duduk di bangku kuliah tanpa didampingi dengan organisasi itu sangat minim ilmu atau pengalaman yang didapatkan, sebab dengan pengalaman dan disiplin ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah dan diluar kampus, itulah yang akan menjadi bekal ketika nanti sudah berada pada dunia yang sesungguhnya (masyarakat).

Adapun motto penulis yaitu, “ ***Banyak Pengalaman Dalam Hidup Namun Yang Membekas Adalah Pengalaman Yang Dilalui Dengan Proses Dan Perjuangan***”

## **PEDOMAN WAWANCARA:**

### **A. Bagaimana Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin Oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba ?**

1. Bagaimana menurut bapak terkait dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang terkait suatu kasus dan memiliki taraf ekonomi yang rendah ?
2. Bagaimana tanggapan bapak terkait dengan mengapa perlu diterapkannya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang terkait suatu kasus dan memiliki taraf ekonomi yang rendah ?
3. Berapa banyak kasus yang telah di tangani oleh posbakum pengadilan negeri bulukumba yang memerlukan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam kurun waktu 2014 hingga 2016 ?
4. Apakah ada kasus yang mendominasi untuk diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma ?
5. Apakah ada prosedur yang ditetapkan oleh posbakum pengadilan negeri bulukumba ketika ada masyarakat yang ingin mengakses ataupun meminta bantuan hukum secara cuma-cuma ? jika ada bagaimana prosedurnya ?
6. Bagaimana peran Posbakum Pengadilan Negeri Bulukumba dalam upaya persamaan hak di hadapan hukum dalam hal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ?
7. Apakah ada factor pendukung ataupun faktor penghambat untuk meningkatkan persamaan hak di hadapan hukum terkait dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma oleh posbakum di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba ?
8. Apakah dengan adanya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini memberikan peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba ?

9. Apa harapan bapak kedepan sebagai Ketua/Hakim/Direktur Posbakum Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba dengan adanya pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma ini ?

